

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang adalah salah satu perhatian yang sangat penting bagi pemerintah. Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) yang merupakan sebagai salah satu Provinsi terbesar di Indonesia juga mengalami masalah kemiskinan. Meskipun dari tahun ke tahun tingkat penduduk miskin yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, mengalami penurunan akan tetapi jumlah kemiskinan tersebut dapat dikatakan masih dalam angka yang cukup besar. Berbagai upaya yang dibuat dalam pengentasan kemiskinan terus dilakukan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Bantuan langsung tunai adalah sebagai salah satu program nasional yang dapat dikatakan belum mampu secara optimal mengurangi angka kemiskinan. Salah satu tujuan dari adanya pembangunan nasional adalah berharap dapat meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, oleh karena itu harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan ini memang dapat dikatakan sebagai salah satu permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena hal tersebut, upaya pengentasan kemiskinan harus terus-menerus dilakukan secara

komprehensif, baik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai banyak faktor, diantaranya ialah tingkat upah yang ditetapkan masih dibawah standar sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, tingkat pengangguran yang dapat dikatakan masih cukup tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup lambat. seseorang dapat dikatakan miskin yaitu bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010: 33) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar minimum serta kebutuhan yang mendasar lainnya yang bergizi; serta (2) jumlah kebutuhan lainnya yang lebih bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (dalam Ravi Dwijayanto 2010:17). Bagian pertama relatif sangatlah jelas. Dimana biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga dari pada makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin.

Tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat dari pendidikan ketenagakerjaan yang merupakan dalam hal produktivitas, dengan asumsi semakin tinggi mutu dari pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas dari pada tenaga kerja, yang akan menyebabkan adanya kenaikan upah atau dengan kata lain akan meningkatkan pendapatan pekerja

tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses untuk menuju suatu perubahan yang konkret. Kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian dapat dikatakan mengalami adanya suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi tersebut lebih tinggi daripada yang dicapai dari pada yang sebelumnya, dan juga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah tujuan akhir dari sebuah pembangunan. Manusia tidaklah hanya menjadi obyek dari sebuah pembangunan namun diharapkan pula dapat menjadi sebuah subyek dari pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang berguna dan bermanfaat guna dengan tujuan adanya kemajuan pada suatu wilayah yang secara makro akan menjadi kemajuan dari pada suatu negara yang akan menjadi lebih baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal II-2021 telah mengalami adanya peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan II-2021 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 3,31 persen dari triwulan sebelumnya. Adanya peningkatan dari ekonomi Indonesia pada triwulan II-2021 terutama didorong oleh adanya peningkatan kinerja dari pada ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan juga konsumsi pemerintah. Adanya perbaikan ekonomi tersebut telah menunjukkan negara Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan

dan tekanan yang terjadi selama beberapa triwulan terakhir karena akibat daripada adanya covid-19.

Pada saat Indonesia mengalami keterpurukan pada saat Covid-19 menyerang, pertumbuhan ekonomi yang sempat terpuruk dan melambat mengakibatkan dampak buruk di beberapa sektor seperti bertambahnya pengangguran terbuka, menurunnya jumlah daripada produksi, menurunnya investasi dan persepsi penanaman modal. Tingkat pengangguran terbuka ini dapat dilihat dengan tidak bertambahnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Justru sebaliknya, karena adanya covid-19 di beberapa sektor dengan harus banyak pekerja yang dirumahkan, atau dengan kata lain pada beberapa sektor terjadi PHK besar-besaran yang dampaknya sangat besar bagi para pekerja.

Banyak angkatan kerja yang mungkin saja tersedia, namun tidak terpenuhinya standar seperti yang dibutuhkan atau dicari daripada lapangan pekerjaan. Standar daripada angkatan kerja yang tersedia dinilai masih terlalu rendah atau kurang terpenuhi dengan tuntutan produktivitas lapangan kerja yang diinginkan atau yang tersedia, ini ditandai dengan kualifikasi atau standar daripada pendidikan, latihan, keterampilan dan pengalaman kerja angkatan kerja masih dianggap terlalu rendah serta kurang memenuhi syarat. Hal tersebutlah yang menjadi sebab untuk lapangan kerja tidak mampu melakukan adanya penambahan daripada produksi lebih cepat yang mengakibatkan upah minimum ataupun penghasilan belum mengalami adanya peningkatan.

Standar dari upah minimum yang diberikan oleh lapangan kerja masih dianggap tidak mampu ataupun belum mampu meningkatkan lebih kesejahteraan bagi para tenaga kerja terkhusus sebagai pemenuhan kebutuhan pokok para pekerja. Dimana seharusnya upah minimum dapat sejalan dengan tingkat kualifikasi pendidikan, tingkat produktivitas kerja, lama jam kerja serta laba atau keuntungan yang dihasilkan dari tenaga kerja. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dimana para angkatan kerja yang ada justru menuntut peningkatan kesejahteraan mereka yang tanpa disadari tidak menghiraukan kewajiban yang ada yang telah disepakati oleh tenaga kerja maupun lapangan pekerjaan tersebut.

Pergerakan daripada pertumbuhan ekonomi yang rendah serta melemah, tingkat pengangguran yang tinggi dan upah minimum yang dapat dikatakan belum dapat mencukupi kebutuhan mempengaruhi tatanan masyarakat yang dapat digolongkan atas penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. Penduduk miskin digolongkan kepada mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada dasarnya dikatakan keluarga miskin ialah mereka yang memiliki tingkat pendapatan atau penghasilan ekonomi yang relatif kecil/rendah.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menunjukkan berbagai hal keanekaragaman yang besar dalam standar hidup dan memiliki tingkat kesejahteraan material yang relatif digolongkan rendah. Bagi warga negara berkembang, dengan pendapatan mereka yang tergolong kecil akan mengharuskan masyarakat untuk terdahulu haruslah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar/pokok. Banyak yang harus tinggal bersama-sama diruangan yang

kecil dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai karena keadaan. Mayoritas penduduknya hidup dan tinggal di daerah pedesaan dengan pekerjaan pertanian yang dapat dikatakan cukup berat dan memakan waktu yang lama. Perjuangan yang harus terus dilakukan secara terus-menerus guna melawan situasi kemiskinan yang berat di kehidupan negara-negara berkembang termasuk Indonesia sendiri.

Jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara sendiri naik menjadi 1,28 juta jiwa pada Maret 2020. Angka tersebut naik 0,12 poin dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 8,75 persen per Maret 2020. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 disebut berjumlah 8,73 persen dan 8,77 persen di pedesaan. Persentase penduduk miskin di kota tersebut naik 0,34 poin sedangkan di desa turun 0,16 poin jika dibandingkan data pada September 2019. Garis kemiskinan dimana pada Maret 2020 telah tercatat sebesar Rp 502.904 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 376.790 atau 74,92 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 126.114 atau 25,08 persen. (BPS 2020).

Gambar 1.1
Grafi
k Kemiskinan 2007-2020



*Catatan : Maret 2011 – September 2013 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Foto: Dok. BPS Sumut

Selain itu, BPS juga telah memaparkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks daripada keparahan kemiskinan. Pada September 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Sumut berada pada angka 1,480 dan naik menjadi 1,513 pada Maret 2020. Pada September 2019, indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,372 dan naik menjadi 0,388 pada Maret 2020. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dimana rata-rata pengeluaran daripada penduduk miskin cenderung semakin menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan juga tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. BPS Sumut menyebutkan bahwasanya secara umum jumlah penduduk miskin di Sumut telah terjadi adanya penurunan yaitu pada periode 2007 hingga Maret 2020. Jumlah jumlah kemiskinan sempat naik pada September 2013, September 2014 hingga

September 2015 karena dipicu adanya kenaikan harga-harga barang daripada kebutuhan pokok.

Setelah itu, secara perlahan-lahan jumlah kemiskinan mulai menurun. Tetapi kembali terjadi peningkatan yaitu pada Maret 2020 ini merupakan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Secara umum, pada periode 2007-Maret 2020 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mulai terjadi penurunan baik jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, September 2014 hingga September 2015 yang disebabkan adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok/dasar yang menjadi akibat daripada kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan pada Maret 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana mempunyai dampak yang cukup besar dalam berbagai sektor. Begitu banyak bisnis yang bangkrut, sangat banyak terjadi PHK secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan, dan itu cukup memiliki dampak bagi perekonomian.

Dari teori serta trend kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti tertarik meneliti yang menjadi pengaruh kemiskinan, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan upah minimum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada variabel Pertumbuhan

Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang menganalisa kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2021. Peneliti akan mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2021.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2021.

3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2021.
4. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi,tingkat pengangguran terbuka,dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah kemiskinan.
3. Sebagai informasi terkait perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang analisis tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Upah Minimum,dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2021 dan sebagai referensi untuk pihak yang membutuhkan.